

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena-fenomena yang disebut dengan Hubungan Internasional selama ini didominasi oleh persoalan-persoalan mengenai perang, diplomasi, ideologi, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, di era globalisasi ini, kejahatan transnasional memiliki andil besar dalam mempengaruhi pertahanan dan keamanan suatu negara. Para pelaku kejahatan transnasional dianggap berbahaya oleh dunia. Tindakan-tindakan yang dilakukan para pelaku kejahatan transnasional menjadi ancaman besar bagi pertahanan dan keamanan semua negara di dunia.

Salah satu penanganan kejahatan internasional yang menjadi konsentrasi dunia dan Indonesia salah satunya adalah isu pembajak dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Sedangkan salah satu penanganan kejahatan transnasional pada bidang maritim tersebut yang menjadi salah satu fokus Indonesia, yakni di kawasan perairan Selat Malaka. Indonesia sudah tidak asing lagi dengan isu pembajak dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Apabila terjadi insiden-insiden di Selat Malaka seperti adanya perompakan ataupun pembajak kapal-kapal yang bermuatan barang, dampaknya bermuara ke seluruh penjuru dunia. Ancaman serius yang ada di Selat Malaka adalah kegiatan dan pembajakan kapal. Pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal telah berlangsung lama di daerah bagian Asia Tenggara sejak ratusan tahun yang lalu, khususnya di perairan Selat Malaka.

Masalah pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Indonesia telah menjadi sejarah yang berulang. Pembajakan modern terbagi menjadi tiga

bentuk (Ikaika Ramones, 2013:1): perampokan kapal yang dilakukan oleh *boarding parties*, sindikat yang mencuri seluruh kapal, dan sindikat yang menyandera awak kapal untuk dimintai tebusan. Namun poin yang terakhir jarang terjadi dalam pembajakan laut di Indonesia. Pembajakan di Indonesia pada zaman dulu dilakukan dengan perampokan sederhana yang bertujuan untuk memberi upeti pada sultan, yang dilakukan di daerah Selat Malaka selama berabad-abad. Namun ketika penjajah Eropa datang untuk mengeksploitasi kesultanan pesisir, sistem ekonomi tradisional menjadi rusak sehingga membuat tindakan pembajakan menjadi semakin intensif pada abad ke-19. Pada saat itu Inggris dan Belanda juga berusaha untuk menekan tindakan pembajakan dengan memberikan alternatif lain untuk membangun ekonomi masyarakat.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya hampir 80 persen didominasi oleh lautan. Salah satu kawasan yang hingga saat ini tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai kejahatan transnasional, khususnya kasus perompakan di Selat Malaka. Panjang wilayah Selat Malaka sekitar 900 mil dan sebagai penghubung Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan, dengan lebar rata-rata Selat Malaka sekitar 8.3 mil. (Nuraeni S, 2010:230)

Perairan di Asia Tenggara memiliki peran strategis karena menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Selat Malaka merupakan salah satu jalur SLOC (*Sea Line of Communication*) dan SLOT (*Sea Line of Trade*) sekaligus *choke point* armada angkatan laut dalam tujuannya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai jalur SLOC, Selat Malaka dilewati 72% kapal-kapal tanker yang melintas dari Samudera Hindia ke Pasifik (Pailah S.Y., 2007:3). Selat Malaka yang masuk ke dalam jalur

SLOC dan SLOT yang memiliki peran penting di jalur perdagangan dunia. Ini merupakan hal yang menjadi perhatian khusus untuk *littoral states*, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand untuk menjaga keamanan di selat tersebut. Betapa penting Selat Malaka bagi dunia sehingga banyak negara yang ingin mengukuhkan pengaruhnya di wilayah laut Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tersebut.

Perairan Selat Malaka merupakan jalur strategis yang wilayahnya berada dibawa kedaulatan empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sangat rentan akan ada berbagai aksi kejahatan di atas laut, seperti perompakan dan perampok bersenjata. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan *litoral states* atau dalam istilah lain negara pantai, yakni negara-negara yang memiliki kawasan yang sama dan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi di wilayah tersebut.

Secara fisik, selat Malaka adalah suatu kawasan perairan pemisah yang telah memisahkan kawasan kedaulatan Indonesia dan Malaysia. Sejak dahulu kawasan ini telah menjadi suatu primadona dikarenakan letaknya yang sangat strategis, yaitu merupakan kawasan internasional tempat bertemunya para saudagar yang akan melanjutkan maupun melakukan pelayaran perniagaan. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Selat Malaka merupakan salah satu selat terpenting dalam sejarah. Hal ini disebabkan letak Selat Malaka yang strategis sehingga menjadi salah satu bagian

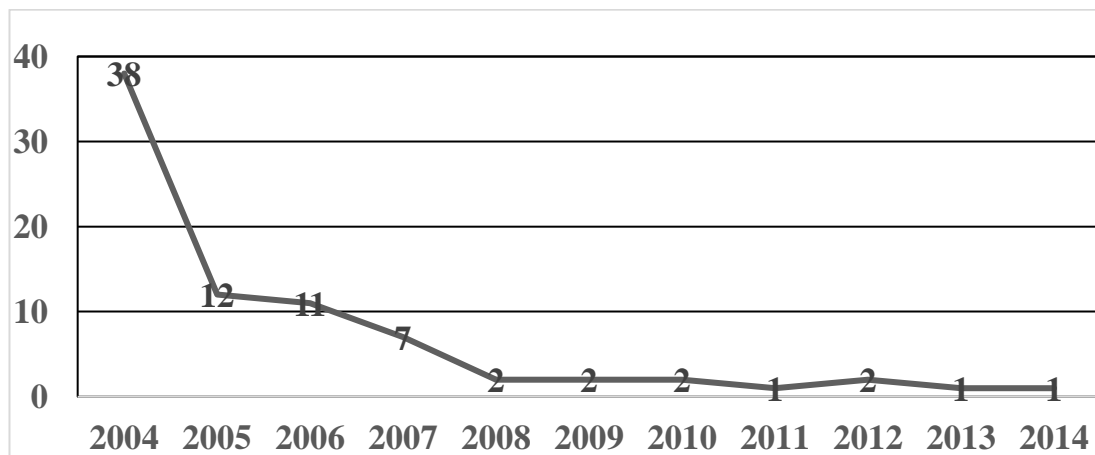
penting dalam sejarah Cina dan India terutama dalam hal jalur perdagangan keduanya. Penguasaan keduanya juga silih berganti antara kerajaan – kerajaan di Jawa (Indonesia) dan kerajaan dari Malaysia. Memasuki abad ke 14, bangsa Arab mulai menguasai daerah ini dan menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Memasuki abad ke 16, Selat Malaka jatuh ke tangan bangsa Eropa yaitu Portugis yang mulai menyebarkan pengaruhnya ke kawasan Asia Tenggara (Rodrigue, 2004: 13). Jatuhnya Selat Malaka ke tangan Portugis ini menjadikan titik awal bangsa Eropa yang mulai berdatangan untuk melakukan kolonisasi dan imperialisasi ke kawasan Asia Tenggara. Pada masa sekarang, Selat Malaka merupakan bagian penting dalam dunia maritim karena mendukung sebagian besar perdagangan maritim antara Eropa dan Asia Pasifik, terbukti dengan 50.000 kapal per tahun atau 600 per hari melewati selat ini dalam rangka perdagangan (Rodrigue, 2004:13). Dengan berjalannya kegiatan perdagangan yang sangat tinggi di daerah maritim tersebut, sehingga memunculkan berbagai aksi kejahatan maritim, salah satunya pembajakan dan perampokan bersenjata.

Pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi di masa kolonial, tetapi hingga sekarang masih terjadi. Di berita elektronik nasional pada tanggal 24/04/2014. Menurut KBRI di Malaysia menyatakan bahwa ada kerjasama sindikat dengan dugaan anggota pelaku pembajakan maritim di Selat Malaka yang terjadi melibatkan Warga Negara Indonesia dan beberapa Warga Negara Asing lainnya. Tentunya dengan hal ini sangat disayangkan. Indonesia telah melakukan berbagai

macam kerjasama di masa pemerintahan SBY dalam melawan kejahatan transnasional tersebut.

Dalam laporan tahunan IMB mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata di dunia, Asia Tenggara menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus dalam pemberantasannya, disamping benua Afrika yang sering menjadi topik utama dunia dalam pembahasan insiden pembajakan dan perampokan bersenjata yang terjadi. Akan tetapi data insiden pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka menunjukkan adanya pergerakan data yang positif dibandingkan dengan wilayah lain. Pada 1.1 menjelaskan tentang dinamika data insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan Selat Malaka pada tahun 2004 hingga 2014

Tabel 1.1 Insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka 2004-2014



Sumber: Laporan Tahunan *International Maritime Bureau*, 2015

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa insiden pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka masih terus terjadi hingga tahun 2014. Terlihat dari data insiden tersebut yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan data insiden terbesar yang terjadi di Selat Malaka pada tahun

2005 terdapat 12 insiden, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2004 terdapat 38 insiden. Pada tahun 2008 hingga 2014 memiliki data insiden yang cenderung fluktuatif, meskipun data insiden yang terjadi masih dinilai kecil. Apabila dibandingkan data pada tahun 2004 hingga 2008 dengan data 2009 hingga 2014 terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 terdapat 38 insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka dibandingkan dengan 10 tahun kemudian, pada tahun 2014 terdapat 1 insiden. Penurunan data insiden di Selat Malaka tidak diikuti dengan data insiden di Asia Tenggara.

Pada dasarnya skripsi ini merupakan lanjutan dari jurnal skripsi yang ditulis oleh Julaene Foela Putri, mahasiswa HI Universitas Riau. Beliau menyusun skripsi yang berjudul “Inisiatif MSP (Malacca Strait Ptol) dalam menangani ancaman perompakan di Selat Malaka”. Dalam jurnal tersebut merumuskan masalah mengenai efektivitas kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol dalam menangani ancaman perompak di Selat Malaka. Beliau menggunakan teori neoliberal, teori kerjasama internasional, dan teori tingkat analisis dalam kerangka teoritisnya (Julaene Foela Putri, 2016:4). Pada skripsi ini memiliki beberapa kekurangan dalam menjelaskan jawaban atas rumusan masalah yang diambil. Beliau tidak menjelaskan indikator-indikator yang dapat dikatakan efektivitas dalam suatu kerjasama. Jurnal tersebut hanya mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Malacca Strait Patrol berjalan. Oleh karena itu penulis berusaha menyempurnakan jurnal sebelumnya dalam skripsi ini dengan cara menganalisis efektifitas Malacca Strait Patrol dalam mengatasi pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka

berdasarkan indikator-indikator efektifitas dalam bingkai teori neo-liberal institusional.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengemukakan permasalahan secara umum yang kemudian dibahas dalam skripsi ini melalui pemaparan pada bagian latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektifitas Malacca Strait Patrol dalam upaya mengatasi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka (2009 – 2014)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol (MSP), sebagai salah satu kerjasama keamanan yang dijalin oleh *litoral states* dalam melawan kejahatan transnasional pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka.
2. Menganalisis sejauh mana keefektivitas Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) atau patroli laut, Eye in the Sky (EIS) atau patroli udara, dan forum Intelligence Exchange Group (IEG) di perairan Selat Malaka.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk akademisi Hubungan Internasional, yakni para pengajar dan

mahasiswa dalam mengkaji dan memahami pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Selat Malaka, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand agar dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada perusahaan kapal (kapal kargo, *yacht*, dan *tanker*) yang melewati Selat Malaka agar dapat melakukan pencegahan dari aksi pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal.

1.5 Kerangka Pemikiran

Teori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang disebut teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Pada dasarnya teori berfungsi membantu kita mengorganisasikan dan menata fakta-fakta yang kita teliti. Dalam penulisan skripsi ini teori neo-liberal institusional oleh Robert Keohane. Teori

tersebut dinilai dapat membantu dalam menjelaskan kejahatan transnasional serta bagaimana penyelesaiannya.

1.5.1 Teori Neo-Liberal Institusional

Teori neo-liberal institusional merupakan salah satu teori Hubungan Internasional yang menggunakan paradigma liberalisme. Menurut Robert Keohane, teori neo-liberal institusional merupakan teori Hubungan Internasional yang mengklaim bahwa institusi, rezim, dan organisasi internasional, global ataupun regional dapat meningkatkan dan membantu kerjasama antar negara. Institusi atau organisasi internasional, atau seperangkat aturan tersebut dapat mengatur tindakan suatu negara dalam berbagai bidang tertentu (R.Jackson & G.Sorensen, 2013:193). Seperti contoh institusi internasional ASEAN Regional Forum dan ASEAN Maritime Forum yang mendukung kinerja organisasi internasional ASEAN. Dalam rezim internasional The Declaration of ASEAN Concord II yang mulai menegaskan isu-isu kemaritiman dan lintas batas wilayah, sehingga menjadi cikal bakal terbentuknya institusi internasional ASEAN Maritime Forum.

Para pemikir yang berada dalam perspektif neo-liberal institusional mengidentifikasi adanya empat asumsi pokok, yakni (Budi Winarno, 2011:110):

- a. Negara merupakan aktor kunci dalam HI, tetapi bukanlah satu-satunya aktor yang signifikan. Aktor *non-state* juga memiliki peran dalam suatu kerjasama.
- b. Negara berusaha memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama dalam lingkungan yang kompetitif
- c. Kerjasama tidak pernah tanpa masalah, tetapi negara menggeser sumber daya dan kesetiannya jika mereka melihat keuntungan bersama, dan jika kerjasama

tersebut menyediakan suatu peningkatan kesempatan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka.

- d. Kerjasama dan perjanjian internasional menghasilkan keuntungan mutlak (*absolute gains*) yang diinginkan oleh semua aktor. Keuntungan mutlak (*absolute gains*) adalah keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain dengan bentuk kerjasama. Hanya dengan kerjasama negara dapat meraih hasil yang pasti (absolut).

Teori neo-liberal institusional menyatakan bahwa institusi internasional bertujuan untuk memajukan kerjasama antar negara. Dalam memperkuat argumen ini, kaum liberal institusional menggunakan pendekatan behavioristik. Langkah empiris perluasan institusionalisasi antar negara digunakan. Perluasan institusionalisasi diukur dengan 2 dimensi, yakni: dimensi ruang lingkup dan dimensi kedalaman. (R. Jackson & G. Sorensen, 2013:193)

Dimensi ruang lingkup yang menyangkut sejumlah bidang isu yang terdapat di institusi. Seperti contoh institusi International Maritime Bureau (IMB) yang konsen dalam biro kemaritiman. Sedangkan dimensi kedalaman dapat dinilai dengan tiga langkah, yakni: kebersamaan (derajat dimana harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipan dalam sistem tersebut), kekhususan (derajat dimana harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan), dan otonom (perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada tergantung pada badan-badan dan agen-agen asing atau negara untuk melakukan hal tersebut. (R. Jackson & G. Sorensen, 2013:193)

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2007:6)

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Efektivitas

Efektivitas memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas ada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yakni pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Menurut Martani dan Lubis (Martani, 1987:55), efektivitas merupakan unsur pokok aktifitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Martani dan Lubis (Martani, 1987:55) ada beberapa kriteria dalam mengukur efektivitas, yakni, *input*/pendekatan sumber, pendekatan proses, dan *output*/pendekatan sasaran

Pendekatan sumber (*resource approach*) merupakan mengukur efektivitas dari *input*, mengutamakan keberhasilan dalam memperoleh sumber daya fisik maupun non-fisik yang dibutuhkan. Pendekatan proses adalah melihat sejauh mana efektivita pelaksanaan program dari semua kegiatan proses atau mekanisme internal. Pendekatan sasaran (*goals approach*) merupakan mengukur efektivitas dari *output*, mengukur keberhasilan dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. (Martani, 1987:55)

1.6.1.2 Pembajakan

Arti pembajakan atau perompakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan perompakan (di laut) atau mengambil alih kapal terbang (kapal laut, bis, dan lain-lain) dengan paksa dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut *United Nations Convention on The Law of he Sea* (UNCLOS) 1982 pada pasal 101, berisikan:

“Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap

Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:

(a) tindakan penjarahan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara pribadi, dan ditujukan:

(i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;

(ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun;

(b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.

(c) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).”

Dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 perompakan atau pembajakan kapal didefinisikan sebagai suatu aksi yang mencakup tindakan ilegal dan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambil-alihan atau tindakan penjarahan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta suatu kapal atau pesawat udara pembajak serta setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan-tindakan pembajakan itu.

1.6.1.3 Perampokan Bersenjata

Perampokan bersenjata terhadap kapal, sesuai dengan Kode Praktek untuk Investigasi Kejahatan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Resolusi Majelis A.1025 (26), didefinisikan sebagai:

“Perampokan bersenjata terhadap kapal berarti setiap tindakan berikut:

(A) setiap tindakan ilegal kekerasan atau penahanan, atau tindakan pemusnahan, atau ancaman, selain tindakan "pembajakan", yang dilakukan untuk tujuan pribadi dan diarahkan terhadap kapal, atau terhadap orang atau

properti di atas kapal tersebut, di perairan internal suatu negara, perairan kepulauan dan laut teritorial;

(B) tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang dijelaskan di atas.” (ReCAAP, 2015:2)

1.6.1.4 Kerjasama Keamanan

Menurut Mochtar Masoed, kerjasama internasional merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut. Mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu. Mengadakan perundingan atau perjanjian di antara kedua belah pihak. (Mochtar Mas' oed, 1993: 15)

Dalam melakukan kerjasama internasional, ada berbagai macam bentuk dalam cara mengikatnya. Kerjasama internasional dalam bentuk kesepakatan, perjanjian, traktat, dan lain-lain. Dari sisi jumlah negara yang terlibat, ada kerjasama unilateral, bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Kerjasama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan keamanan, sosial, kebudayaan, dan politik, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan nasional.

Pengertian keamanan ialah sebagai tidak adanya ancaman eksistensial pada negara yang muncul dari negara lain mendapatkan kritik keras dari dua aspek. Pertama, dikatakan bahwa negara bukanlah subjek tunggal dalam keamanan. Keamanan sosial (kelompok minoritas, etnis, agama, dan budaya), keamanan

manusia (setiap individu dengan kebutuhan dasarnya), dan keamanan global (masyarakat dunia) sebagai keamanan yang mempunyai hak yang sama dengan negara. Kedua, keamanan yang hanya identik pada bentuk fisik dan berbau politis adalah salah. Adanya aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia juga penting dalam hal keamanan, seperti keamanan ekonomi, keamanan informasi, dan keamanan lingkungan. (Harrald Muller, 2013:761)

Kerjasama keamanan biasanya dipahami sebagai suatu bentuk kolaborasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Kerjasama keamanan mengisyaratkan pada tujuan kepentingan, kelangsungan hidup bangsa pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain, yang sulit untuk mencapai kesepakatan dengan gagasan keamanan yang hanya dijamin dengan menolong diri sendiri (*self-help*). Selain itu, kerjasama keamanan mengakibatkan hilangnya sebagian kebebasan bertindak, hambatan pada kemampuan negara untuk mengakumulasi kekuatan militer sebanyak mungkin sesuai sumber daya. Ada tiga varian kerjasama keamanan, yakni: hubungan yang harus dibangun dengan bekas musuh paska perang, berjalannya dewan keamanan PBB, dan kemanan kolektif untuk menghindari bahaya dan dapat mencapai *balance of power* (Harrald Muller, 2013:762).

1.6.1.5 Selat Malaka

Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Malaysia, Singapura) dengan Pulau Sumatra (Indonesia) yang kini menjadi lambung pelayaran perekonomian dunia. Secara geografis, Selat Malaka membentang sepanjang 900 mil. Selat Malaka juga tersambung dengan selat Singapura yang mempunyai panjang selat 60 mil. Lebar alur masuk di sebelah utara

sekitar 220 mil laut dan berakhir pada ujung sebelah selatan dengan wilayah tersempit selebar 8 mil laut (Mochzani Zubir, 2004: 2).

Perairan Selat Malaka adalah jalur pelayaran penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta jalur perdagangan bagi *user states* dan *litoral states* seperti Indonesia, Singapura, India, Jepang dan Cina. Selat Malaka menjadi salah satu pusat pelayaran perniagaan internasional sejak dahulu kala, jauh sebelum Indonesia merdeka. Selat Malaka telah menjadi kawasan perdagangan pada masa sebelum kolonialisme, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka dan lain-lain. Peran Selat Malaka terus berlanjut ke masa kolonial dan hingga sekarang. Selat Malaka memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah sekitarnya (<https://nationalgeographic.co.id/> diakses pada tanggal 2 Februari 2017).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Indikator efektivitas

Indikator dalam kerjasama internasional yang dikatakan efektif dalam penelitian ini dinilai dari tiga hal, yakni *input*, *process*, dan *output*.

a. Pendekatan sumber /*input*:

- Adanya sarana dan prasarana pendukung dari *litoral states* yang dinilai mampu dalam melaksanakan Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) atau patroli laut dan Eye in the Sky (EIS) atau patroli udara di Selat Malaka.
- *Litoral states* menyediakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan, salah satu contohnya menyediakan sumber daya manusia atau personil yang mampu

melaksanakan Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) dan Eye in the Sky (EIS) di Selat Malaka.

- Keterbukaan informasi yang dibutuhkan di Intelligence Exchange Group (IEG) dalam melaksanakan Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) atau patroli laut dan Eye in the Sky (EIS) atau patroli udara di Selat Malaka pada masing-masing negara *litoral states*

b. Pendekatan proses/*Process*:

- *Litoral states* yang terlibat dalam Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) atau patroli air dan Eye in the Sky (EIS) atau patroli udara di Selat Malaka, melaksanakan seluruh peraturan-peraturan yang terdapat pada perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati.
- Menanggulangi seluruh hambatan-hambatan yang terdapat pada pelaksanaan Malacca Strait Sea Patrol (MSSP), Eye in the Sky (EIS), dan Intelligence Exchange Group (IEG) di Selat Malaka.

c. Pendekatan sasaran/*output*:

- Data insiden pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka mengalami penurunan yang signifikan.
- Dicabutnya status *black water* atau zona berbahaya di perairan Selat Malaka yang berdampak terhadap kapal-kapal yang melewati.
- Data lalu lintas kapal-kapal di Selat Malaka meningkat.

1.6.2.2 Pembajakan

Pembajakan kapal yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni:

- a. tindakan ilegal dan kriminal seperti kekerasan, penjarahan, dan penyekapan

- b. serangan menggunakan senjata
- c. melibatkan lebih dari satu kapal
- d. dilakukan di laut lepas (*high seas*) atau di luar wilayah teritorial negara-negara tertentu, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka
- e. untuk tujuan pribadi

1.6.2.2 Perompakan bersenjata terhadap kapal

Perompakan bersenjata terhadap kapal yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni:

- a. tindakan ilegal dan kriminal seperti kekerasan, penjarahan, penyekapan, pemusnahan serta ancaman
- b. serangan menggunakan senjata
- c. melibatkan lebih dari satu kapal
- d. dilakukan di laut teritorial, khususnya di wilayah laut teritorial Indonesia Malaysia, Singapura dan Thailand yang berada di perairan Selat Malaka
- e. untuk tujuan pribadi

1.6.2.3 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan yang dimaksud dalam penelitian merupakan bentuk upaya kerjasama yang dijalin oleh *litoral states*, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengamankan perairan Selat Malaka dari aksi pembajakan dan perompakan kapal. Bentuk kerjasama keamanan yang dijalin yakni Malacca Strait Patrol (MSP) yang terdiri dari Malacca Strait Sea Patrols (MSSP) atau patroli Laut, Eyes in the Sky (EIS) atau patroli udara, dan Intelligence Exchange Group (IEG).

1.6.2.4 Selat Malaka

Wilayah perairan Selat Malaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di dalam serta di luar wilayah teritorial *litoral states*, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di Selat Malaka.

1.6.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana efektivitas Malacca Strait Patrol dalam menangani pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal, khususnya di perairan Selat Malaka. Malacca Strait Patrol merupakan salah satu kerjasama keamanan dan pertahanan yang menjadi bidang utama dalam mengatasi kejahatan transnansional ini. Dengan kerjasama dapat menjadi lebih mudah dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan negara beserta di kawasan sekitarnya.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di perairan Selat Malaka memiliki batasan-batasan. Yang diteliti mengenai kejahatan transnasional pada bidang kejahatan maritim dalam pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Rentang waktu yang diteliti adalah pada tahun 2009 hingga 2014. Kerjasama yang diteliti hanya dalam lingkup Malacca Strait Patrol. Letak lokasi permasalahan yang terjadi di perairan Selat Malaka.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

- a. Studi Kepustakaan, bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian, melalui dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan
- b. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan serta menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada Badan Keamanan Laut RI atau Bakamla RI dan Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut atau Koarmabar TNI AL di Jakarta.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu data-data yang didapatkan bukan berbentuk numerik dengan melalui beberapa faktor-faktor yang relevan dengan penelitian ini, akan tetapi mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis data-data ataupun variabel-variabel yang berhasil ditemukan. Kemudian berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Penggunaan metode analisis data kualitatif dikarenakan data-data penelitian yang dikumpulkan berupa kasus, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kasus, pernyataan-pernyataan dari media cetak ataupun elektronik dan hasil wawancara.

Aktivitas analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:16), yakni:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapat dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan rinci dan teliti. Oleh karena itu perlu dilakukannya analisis data kualitatif melalui reduksi data. Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok,

merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengarahkan, menggolongkan, mempertajam, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yakni seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data mengalami reduksi, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data adalah alur yang bertujuan untuk menyajikan data setelah dikumpulkan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk matriks, bagan, uraian singkat, jaringan, grafik, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yakni berbentuk teks naratif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang berbentuk naratif. Data yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan masalah yang diteliti. Dalam penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

c. Analisis Data

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data perlu dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh dari lapangan yang sudah diedit maupun yang belum dapat diidentifikasi lagi agar mendapatkan hasil yang diinginkan untuk tahap selanjutnya dalam penelitian, yakni

tahap kesimpulan. Tahap tersebut terdiri dari mengatur, mengelompokan, mengurutkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah atau fokus yang ingin dijawab.

d. *Verifikasi/Conclusion Drawing*

Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal pada umumnya masih bersifat sementara, dan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila penelitian yang telah terbukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya adalah mengolah dan menganalisis data-data yang telah terkumpul menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan mempunyai makna.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian (definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan) serta sistematika penulisan di bab-bab selanjutnya.

Bab II : Dinamika Pembajakan dan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal di Selat Malaka dan Malacca Strait Patrol tahun 2009 2014

Bab ini berisikan pembahasan mengenai Selat Malaka dalam sisi sejarah, keadaan geostrategis hingga peran signifikan pada wilayah sekitarnya, perkembangan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Selat Malaka, taktik hingga perilaku aksi kejahatan tersebut, dan tipe-tipe kapal yang mengalami insiden pembajakan dan perampokan bersenjata tahun 2009 hingga 2014. Selain itu, penjelasan mengenai Malacca Strait Sea Patrol (MSSP), Eye in the Sky (EIS), dan Intelligence Exchange Group (IEG) yang merupakan bagian dari kerjasama keamanan Malacca Strait Patrol (MSP).

Bab III : Efektivitas Malacca Strait Patrol dalam mengatasi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Selat Malaka

Bab ini berisikan pembahasan mengenai efektivitas Malacca Strait Patrol dalam mengimplementasikannya untuk upaya mengatasi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Selat Malaka berdasarkan indikator-indikator efektivitas di pendekatan sumber/*input*, pendekatan proses/*process*, dan pendekatan sasaran/*output* dalam bingkai teori neo-liberal institusional.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang telah diajukan dalam bagian awal penelitian. Saran sebagai masukan bagi pembuatan kebijakan maupun untuk penelitian selanjutnya.